

## **Penerapan Dematerialisasi Secara Menyeluruh bagi Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham di Pasar Modal = The Implementation of Dematerialization on Equity Securities in Indonesia Capital Market**

Rizki Kartika Maharani, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920556603&lokasi=lokal>

---

### **Abstrak**

Berdasarkan data PT KSEI, sampai dengan 30 April 2021, masih terdapat 2.724.008.172.889 saham dalam bentuk warkat. Dalam rangka mendorong likuiditas perdagangan, PT KSEI berupaya untuk memenuhi rekomendasi CPSS-IOSCO untuk melakukan dematerialisasi secara menyeluruh bagi efek bersifat ekuitas di pasar modal Indonesia. Penerapan dematerialisasi efek akan mengubah bentuk efek menjadi tidak berwujud dan dialihkan ke dalam sistem pemindahbukuan. Saat ini, bukti kepemilikan saham dalam bentuk warkat masih dimungkinkan dalam Undang-Undang Pasar Modal karena tidak mewajibkan Emiten dan/atau Perusahaan Publik untuk mencatatkan Efeknya di Bursa Efek dan masih memungkinkan penyelesaian transaksi dengan serah terima fisik efek. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal terdapat kewajiban melakukan pencatatan efek bersifat ekuitas di Bursa Efek dan pendaftaran di penitipan kolektif oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), sehingga Efek tidak lagi diterbitkan dalam bentuk warkat. Sedangkan bagi efek warkat yang telah terbit dilakukan dengan melakukan konversi atas Efek warkat ke pencatatan elektronik. Dalam proses pengalihan saham kepada bentuk pencatatan elektronik, Efek warkat yang dititipkan di Kustodian (Perusahaan Efek dan Bank Kustodian) dengan status unclaimed assets merupakan tantangan dalam penerapan dematerialisasi efek secara penuh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis, sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Konsep dematerialisasi efek belum dapat diselenggarakan secara menyeluruh, sehingga perlu dilakukan harmonisasi pada tingkat Undang-Undang. Penanganan dan pengelolaan unclaimed assets yang menjadi hambatan penerapan dematerialisasi membutuhkan penguatan peran Balai Harta Peninggalan yang secara Undang-Undang diberikan kewenangan untuk mengurus dan menyelesaikan aset yang tidak diketahui pemiliknya serta peran Otoritas Jasa Keuangan yang berdasarkan kewenangannya dapat mengatur penanganan dan pengelolaan unclaimed assets.

.....Based on data from PT KSEI, as of April 30, 2021, the scrip form of shares was 2,724,008,172,889 shares. In order to encourage trading liquidity, PT KSEI strives to comply with the CPSS-IOSCO recommendation to carry out a complete dematerialization of equity securities in the Indonesian capital market. Principles of Financial Market Institution principle 11 stated that the Central Securities Depository (CSD) must maintain securities in an immobilised or dematerialised form for their transfer by book entry. The implementation of securities dematerialization will change the form of securities to become intangible and be transferred to the book-entry system. Currently, the scrip form is still possible under the Capital Market Law because it does not require registration on the Stock Exchange and allows securities settlement with physical handover. In the Regulation of the Financial Services Authority (POJK) regarding the Implementation of Activities in the Capital Market Sector, there is an obligation to register equity securities on the Stock Exchange and on the collective registration by the Central Securities Depository (LPP), so that securities are no longer issued in scrip form. Meanwhile, for scrip securities that have been issued, it is done

by converting the scrip form into electronic records. In the implementation, the scrip form deposited in Custodians (Securities Companies and Custodian Banks) with unclaimed assets status is a challenge to fully implement the securities dematerialization. This study uses normative juridical research methods and descriptive analysis. The data source used is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The concept of dematerialization has not been fully implemented, so it is deemed necessary to regulate at the level of the law. The handling and management of unclaimed assets require strengthening the role of the Balai Harta Peninggalan which is authorized to manage unclaimed assets and strengthening the role of the Otoritas Jasa Keuangan that authorized to regulate the handling and management of unclaimed assets.